

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Pada penyusunan skripsi ini, peneliti mempelajari beberapa karya ilmiah dan memiliki keterkaitan penelitian yang diteliti, diantaranya:

Yuli Safitri, (2019), *“Pengembangan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Antar-Brak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus”*. Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Intan Lampung. Pada penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif-deskriptif dan menggunakan teknik *Purpose Sampling* untuk menentukan sampel. Hasil penelitian ini: di Desa Antar-Brak pelaksanaan PKH pada bidang pendidikan dan kesehatan telah membaik, pengembangan masyarakat dibidang pendidikan tingkat putus sekolah menurun. Kemudian tingkat kesadaran memeriksakan kesehatan rutin oleh ibu hamil serta anak balita pada layanan kesehatan terdekat telah muncul pada keluarga yang kurang mampu.⁶ Adapun persamaan antara peneliti Yuli Safitri dengan penulis yaitu terletak pada tema penelitiannya. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada fokus penelitiannya dimana peneliti Yuli Safitri lebih memfokuskan proses tindakan kolektivitas masyarakat dibidang kesehatan dan pendidikan, sedangkan penulis lebih memfokuskan pada peningkatan ekonomi melalui Program Keluarga Harapan tersebut.

Cita Fauziatul Akmala, (2017), *“Implementasi Keluarga Harapan Di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung”*.

⁶Yuli Safitri, *“Pengembangan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Antar-Brak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus”*, Lampung : Skripsi FDIK UIN RIL 2019, sumber : repository.radenintan.ac.id, diakses pada tanggal 13 April 2020

Mahasiswa jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, teori implementasi kebijakan serta teori penanggulangan kemiskinan. Hasil penelitian ini: Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung dalam proses implementasi terdapat tiga (3) tahap yaitu: tahap pengorganisasian, tahap interpretasi serta tahap aplikasi. Pemberian bantuan dalam bentuk bantuan sosial dan pemberdayaan, sebagai pemecahan masalah kemiskinan oleh PKH. Bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang yang diberikan setiap tiga bulan sekali, namun dalam bentuk pemberdayaan berupa motivasi dan dorongan untuk berwirausaha.⁷ Adapun persamaan dalam penelitian Cita Fauziatul Akmla dengan penulis yaitu sama-sama menggunakan Program Keluarga Harapan sebagai objek yang akan diteliti, sedangkan perbedaannya penelitian ini fokus pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Cahyanti Puspaningsih, (2016), "*Pembinaan Keluarga Miskin Melalui Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*". Mahasiswa Jurusan PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan komunikasi serta pendekatan pekerja sosial. Hasil penelitian ini: komitmen PKH dalam pembinaan keluarga miskin di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, berupa pendekatan mikro, mezzo dan makro dalam rangka kerja sosial. Penulis menyimpulkan bahwa sebelum adanya Program Keluarga Harapan terjadi perubahan sosial pada situasi sosial peserta PKH di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yang mengalami kegagalan dari segi pendidikan dan kesehatan harus menjadi salah satu kunci pengentasan kemiskinan di

⁷Cita Fauziatul Akmla, "*Implementasi Keluarga Harapan Di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung*", Yogyakarta: Skripsi FIDK UIN Sunan Kalijaga 2017, sumber digilib.uin-suka.ac.id, diakses pada tanggal 15 Juli 2020

Indonesia. Dan dengan adanya Program Keluarga Harapan Kemensos telah mewujudkan impian peserta PKH melalui program ini dan adanya kesehatan serta pendidikan gratis. Program ini telah berjalan dari tahun 2010 hingga sekarang, belum berhasil dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Di mana seharusnya pendidikan dan kesehatan adalah salah satu kunci untuk memberantas kemiskinan yang ada di Indonesia.⁸ Persamaan antara penelitian Cahyanti Puspaningsih dengan penulis yaitu sama-sama menggunakan Program Keluarga Harapan sebagai objek yang akan diteliti, sedangkan perbedaannya dalam penelitian Cahyanti Puspaningsih memfokuskan terhadap pembinaan keluarga kurang mampu/miskin melalui PKH.

Hasil kajian yang dilakukan peneliti sebelumnya, mengkaji pengembangan, implementasi, dan pengembangan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan. Sedangkan penelitian ini, peneliti membahas tentang upaya pengembangan masyarakat dalam peningkatan ekonomi di Desa Sumber Jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur melalui Program Keluarga Harapan itu sendiri.

B. Kerangka Teori

1. Pengembangan

Pengembangan merupakan cara, proses, mengembangkan pembangunan dengan cara yang bertahap serta teratur sesuai sasaran yang telah ditujukan.⁹ Pengembangan adalah suatu usaha yang ditujukan untuk meningkatkan keahlian baik moral, konseptual maupun konseptual. Salah satu contohnya adalah pengembangan

⁸Cahyanti Puspaningsih, "*Pembinaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*", Makassar: Skripsi : FDIK 2016, Sumber : Repositori. Uin-alauddin.ac.id, diakses pada tanggal 15 Juli 2020

⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka: 2003, h. 473

Sumber Daya Manusia (SDM), upaya guna mengembangkan kemampuan dan kualitas.

Menurut Gouzali, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kegiatan organisasi yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan (*knowladge*), keterampilan (*skill*), dan kemampuan (*ability*) sesuai dengan kebutuhan yang ada di lingkungan kerja.¹⁰ Sedangkan menurut Hasibuan, jenis pengembangan dibagi menjadi 2 ialah pengembangan informal serta formal.

Pengembangan informal, merupakan usaha pengembangan diri sendiri (karyawan) dengan acuan karya tulis sesuai jabatan dan pekerjaan. Dengan artian pengembangan informal menunjukkan individu tersebut memiliki kemauan keras menambah wawasan kemampuan kerjanya agar maju tanpa tuntutan apapun melainkan dengan keinginan diri sendiri.

Pengembangan secara formal, merupakan pelatihan atau pendidikan yang telah dibuat organisasi, baik yang dilakukan oleh organisasi maupun lembaga pendidikan atau pelatihan.¹¹ Dengan artian bahwa pengembangan secara formal dilaksanakan berdasarkan dengan tuntutan pekerjaan dalam sebuah perusahaan maupun organisasi dan lembaga-lembaga lainnya.

- a. Tujuan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - 1) Peningkatan produktivitas kerja
 - 2) Mencapai efisiensi tenaga, waktu serta pemborosan
 - 3) Peningkatan pelayanan
 - 4) Peningkatan peluang karier
 - 5) Peningkatan kemampuan konseptual

¹⁰ M. Kadarisman, “*Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*”, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013, h.5

¹¹ Ibid, h.29

- 6) Peningkatan kepemimpinan
- 7) Mengurangkan serta menghilangkan kinerja kerja yang buruk, DLL.

2. Masyarakat

Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut “society” karena kata “society” yang berarti teman. Di sisi lain, dalam bahasa Arab, “syirik” berarti bergaul satu sama lain dan berinteraksi dalam istilah ilmiah. Secara umum, masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki kelompok-kelompok yang berkaitan dengan kepentingan sama. Atau bisa dikatakan juga sebagai salah satu satuan sosial atau kesatuan kehidupan manusia.

Dalam ilmu sosiologi dikenal dengan adanya dua macam bentuk masyarakat, ialah masyarakat patembayan dan masyarakat paguyuban. Masyarakat patembayan dikenal dengan hubungannya yang tanpa pamrih satu sama lain antar anggota. Masyarakat paguyuban dikenal terdapat hubungan pribadi antara satu sama lain sehingga menimbulkan sebuah ikatan batin antara mereka,

Menurut Soerjono Soekanto masyarakat memiliki beberapa ciri, yaitu.

- a. Manusia yang hidup secara berkelompok
- b. Melahirkan suatu kebudayaan
- c. Terjadinya perubahan
- d. Manusia yang saling berkomunikasi
- e. Memiliki pemimpin.
- f. Adanya stratifikasi sosial.¹²

¹²Soerjono Soekanto, “*Sosiologi Suatu Pengantar*”, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 22-318

3. Peningkatan Ekonomi

Peningkatan merupakan sebuah proses usaha yang bertujuan menaikkan kemajuan kegiatan kearah yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Menurut Moelino dalam kutipan samiwati, peningkatan adalah jalan atau usaha yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan seseorang. Di mana pada buku Stephen P. Robbins perilaku organisasi (2003:52)¹³, mengatakan keterampilan adalah sebuah kemampuan seseorang saat menjalankan tugas di dalam pekerjaannya, yang memiliki empat kategori yaitu *Technical Skill, Basic Literacy Skill, Problem Solving dan Interpersonal Skill*.

Peningkatan ekonomi dapat diartikan sebagai usaha yang wajib dilaksanakan agar masyarakat mendapatkan kesejahteraan, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara terus menerus pemerintah harus berupaya menjalankan semua aspek-aspek yang mendukung, dan juga perencanaan agar manajemen organisasi lebih jelas dan terarah. Oleh sebab itu untuk mensukseskan peningkatan ekonomi sesuai dengan yang telah diharapkan maka peneliti menggunakan teori perencanaan SITARS oleh Hudson dalam Tunner (1981) yang telah dikembangkan sebagai penggabungan dari taksonomi Hudson untuk mengetahui cara atau proses dalam upaya peningkatan ekonomi tersebut, yang meliputi:¹⁴

- a. Teori sinoptik, adalah rencana sistem, pendekatan sistem rasional, rencana keseluruhan yang rasional. Saat membuat perencanaan dengan berfikir secara sistem, perencanaan akan dilihat sebagai sesuatu yang

¹³Stephen P Robbins dan Timothy A Judge, "*Perilaku Organisasi*", Jakarta: Salemba Empat, 2008, h.449

¹⁴Husaini Usman, "*Manajemen*", Jakarta: Bumi Aksara, 2008, h.75

lengkap, karena memiliki tujuan yang sama sebagai visi.

Langkah perencanaan ini meliputi:

- 1) Mengenalkan permasalahan
- 2) Memperkirakan masalah dalam ruang lingkup
- 3) Menyusun cara penyelesaian
- 4) Upaya pengumpulan data permasalahan
- 5) Memprediksikan pilihan lain yang mendukung
- 6) Menilai kemajuan penyelesaian masalah secara khusus.¹⁵

- b. Teori Inkremental, teori ini didasarkan pada keterampilan institusional dan kinerja pribadi. Rencana ini berfokus pada perencanaan jangka pendek karena terdesentralisasi dan tidak cocok untuk jangka panjang. Dalam teori ini, desentralisasi berarti bahwa para perencana selalu memperhitungkan faktor-faktor lingkungan ketika merencanakan suatu objek tertentu dalam suatu institusi.
- c. Teori Transaktif, dalam teori ini lebih menekankan kepentingan pribadi untuk mengembangkan individu sehingga memiliki kemampuan dalam mengadakan perencanaan.
- d. Teori Advokasi, teori ini digunakan secara nasional untuk kepentingan publik. Teori ini menekankan toleransi, kemanusiaan, melindungi kelompok minoritas, memajukan persamaan hak dan

¹⁵ Ibid, h.75

kepentingan umum. Dan sering digunakan oleh pemerintah ataupun badan pusat karena dinilai lebih tepat.

- e. Teori Radikal, memberikan peran penting kebebasan bagi organisasi dan lembaga lokal untuk mengatur rencana mereka, hal ini dimaksudkan agar perencanaan cepat diubah mengikuti keadaan sekitar lingkungannya sesuai kebutuhannya.
- f. Teori Sitar, teori ini adalah gabungan dari teori-teori di atas, teori ini menggabungkan keunggulan dari setiap teori. Oleh karena itu teori ini lebih lengkap dalam memperhatikan kondisi maupun situasi masyarakat sebagai empat perencanaan yang akan dikerjakan.¹⁶

Oleh karena itu, teori ini menjadi SITARS dan S terakhir adalah huruf pertama dari teori situasional. Artinya teori baru ini didasarkan pada kombinasi teori-teori yang ada dan digabungkan, serta adaptasi dengan kondisi lembaga pendidikan dan masyarakat.

Tahap penting dalam sebuah perencanaan adalah manajemen , karena lingkungan luar selalu berubah-ubah sehingga dengan adanya perencanaan mereka dapat menghadapi situasi tersebut. Dengan perencanaan tujuan manajemen organisasi menjadi lebih jelas dan terarah, sehingga organisasi mengetahui masing-masing point yang ditujukan untuk mencapai hal yang dikehendaki . Seluruh struktur organisasi juga akan bekerja ke satu arah yang sama

¹⁶ Ibid, h.75

sesuai perencanaan yang telah mereka sepakati sebelumnya, menolong memprediksi hambatan serta peluang, agar pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien, membantu mengurangi resiko dan ketidakpastian serta perencanaan dapat diartikan sebagai aktivitas pengawasan.¹⁷

Yang dimana dalam teori ini memiliki tujuan yang sama untuk memecahkan permasalahan, memiliki objek perencanaan yaitu antara manusia dan lingkungan, persyaratan data, pengetahuan serta metode. meskipun dalam penggunaan masing-masing teori terdapat perbedaan titik beratnya, serta sumber daya dan mempertimbangkan segala aspek didalamnya untuk mencapai tujuan.

a. Strategi peningkatan ekonomi

- 1) Tingkatkan aksesibilitas guna memperlancar aliran investasi serta penciptaan dan tingkatkan keterkaitan ekonomi yang paling menunjang.
- 2) Menitik beratkan pemanfaatan kemampuan Sumber Daya Alam yang belum tergali didaerah tertinggal dan serta menghasilkan pertumbuhan kawasan-kawasan ekonomi yang baru.
- 3) Tingkatkan kelangsungan aktivitas usaha yang telah ada.
- 4) Tingkatkan keahlian pemerintah wilayah dalam meningkatkan energi tarik investasi yang bersumber pada keunggulan komperatif serta

¹⁷Arief Bowo PK, SE, MM, “*Perencanaan*”, Jakarta: Universitas Mercu Buana, 2015

kompetitif yang cocok dengan kemampuan SDA dan SDM sesuai posisi geografis.¹⁸

4. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program ini digagas oleh Kementerian Sosial sebagai bantuan tunai bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM), dengan syarat-syarat kepesertaan terpenuhi.

a. Tujuan PKH

Tujuan umum PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengubah sikap terhadap partisipasi dalam komunitas PKH dengan sedikit dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menghilangkan rantai kemiskinan antargenerasi.

Tujuan khusus PKH:

- 1) Menambah mutu kesehatan KSM.
- 2) Menambah derajat tingkat pendidikan untuk anak-anak KSM.
- 3) Menambah ruang serta kualitas layanan kesehatan KSM, terkhusus pada anak-anak dan juga pendidikan.

Dengan target tujuan yang jelas di atas diharapkan bisa menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) peserta PKH.

b. Syarat kepesertaan PKH

Untuk menjadi peserta PKH di bawah Kementerian Sosial, Keluarga Sangat Miskin (KSM)

¹⁸Rahardjo Adisasmita, "*Manajemen Pemerintah Desa*", Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, h. 126

harus memenuhi beberapa persyaratan PKH dan telah menandatangani kontrak yang disepakati.¹⁹

c. Kewajiban peserta PKH

Kewajiban Peserta PKH :

- 1) Pemeriksaan difasilitas kesehatan bagi ibu hamil sesuai dengan aturan pelayanan yang tersedia.
- 2) Melaksanakan pemeriksaan setelah persalinan untuk ibu nifas.
- 3) Membawa anak-anak di bawah usia 5 tahun dan anak usia prasekolah secara teratur ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan layanan kesehatan.
- 4) Wajib mendaftarkan serta menyekolahkan hingga menyelesaikan wajib belajar anak dari usia 7-21 tahun.²⁰

d. Indeks dan komponen bantuan PKH

Skema Bantuan	Indeks Bantuan Per-KSM/Thn
Bantuan tetap	Rp. 500.000
Bantuan komponen PKH:	
a. Ibu Hamil/Menyusui/Nifas/balita/ anak pra- sekolah	Rp. 1.000.000
b. Anak SD dan yang sederajat	Rp. 450.000

¹⁹ Direktorat Jaminan Sosial, “*Buku Kerja Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan*”, Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial kementerian Sosial RI, 2015, h.10

²⁰ Ibid, h.12-13

c. Anak SMP dan yang sederajat	Rp.	750.000
d. Anak SMA dan yang sederajat	Rp.	1.000.000
Bantuan minimum per KSM	Rp.	950.000
Bantuan maksimum per KSM	Rp.	3.700.000

Sumber: Dokumentasi PKH Desa Sumber Jaya

e. Sanksi Peserta PKH

Sanksi bagi peserta PKH akan dikenakan kepada peserta PKH apabila jika:

Gagal memenuhi kewajibannya, nominal bantuan akan dikurangi 10% pada setiap tahap penyaluran bantuan. Pengurangan nominal bantuan atau tanpa bantuan sebesar 100%, ketika peserta PKH tidak memenuhi kewajibannya untuk mengunjungi fasilitas kesehatan dan pendidikan sesuai protokol yang berlaku untuk masing-masing fasilitas selama tiga bulan berturut-turut.²¹

Akan dikeluarkan secara permanen dari keanggotan PKH, jika tidak memenuhi kewajiban untuk mengunjungi fasilitas kesehatan dan pendidikan selama enam bulan berturut-turut sesuai dengan protokol yang ada.

²¹ Ibid, h.16

f. Mitra pendamping bantuan PKH

Mitra kerja pendamping PKH:

1	Aparat kecamatan	9	Petugas layanan pendidikan
2	UPT Dinas Pendidikan	10	Petugas layanan kesehatan
3	UPT Dinas Kesehatan	11	Kepala Desa
4	Pegawai dari Kantor Urusan Agama	12	Ketua kelompok
5	Koordinator Kabupaten/Kota	13	Tokoh agama
6	Operator PKH Kabupaten	14	Tokoh masyarakat
7	Pendamping lain dalam satu kecamatan	15	Pemangku kepentingan (<i>stake holders</i>) lain di kecamatan yang berkaitan dengan pelaksanaan PKH
8	Petugas bayar (PT. POS atau Agen Bank)		

Sumber: Dokumentasi PKH Desa Sumber Jaya

g. Tahap penyaluran bantuan PKH

1) Peserta PKH lama:

- a) Bantuan diberikan kepada peserta PKH dalam empat tingkatan setiap tahunnya.
- b) Pada tahap II, peserta PKH menerima bantuan tetap dan sebagian.²²

2) Peserta PKH baru:

1. Distribusi tahap IV akan memberikan dan melaksanakan dukungan pada bulan November atau Desember di tahun berjalan kepada peserta PKH.

²² Ibid, h.18

2. Pembagian bantuan peserta PKH akan diberikan $\frac{1}{4}$ yang berasal dari seluruh bantuan tahunan, baik berupa bantuan anggota maupun bantuan tetap.

h. Struktur kelembagaan PKH daerah

1. Tim koordinasi teknis PKH kabupaten/kota

Tim koordinasi PKH ini untuk mendorong partisipasi instansi/kota penyelenggara pelayanan dan mengatasi permasalahan dalam penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan terkait pelaksanaan program ditingkat kabupaten/kota untuk pelaksanaan.²³

2. Tim koordinasi PKH kecamatan

Mendorong keterlibatan penyelenggara layanan dan menyelesaikan permasalahan terkait pelaksanaan program ditingkat kecamatan dalam penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Tim ini dibentuk untuk memastikan persiapan dan pemenuhan tanggung jawab kecamatan dalam pelaksanaan PKH. Unit pelaksanaan PKH (UPPKH) kabupaten/kota terdiri dari:

- a) Pelatih UPPKH Kabupaten/Kota (penanggung jawab kesejahteraan sosial/sistem sosial).

²³ Ibid, h.19

- b) Koordinator UPPKH Kabupaten/Kota.
 - c) Anggota Tim UPPKH Kabupaten/Kota..
 - d) Koordinator Kabupaten/Kota..
 - e) Penyelenggara PKH Kabupaten/Kota..
3. Unit pelaksanaan PKH kecamatan

Unit pelayanan kecamatan jika ada beberapa orang pendamping, maka akan ditunjuk seorang untuk bertanggung jawab sebagai koordinator kecamatan. Dan anggota UPPKH kecamatan yaitu pendamping PKH.

